



Article Informations
Corresponding Email:
muthia.ilmaa@gmail.com

Received: 31/07/2024; Accepted:
23/10/2024; Published: 23/10/2024

KERJA SAMA INDONESIA-TIONGKOK MELALUI *BELT AND ROAD INITIATIVE (BRI)* DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA TAHUN 2019-2023

Muthia Ilma Fauziyyah¹⁾, Taufik Hidayat²⁾, Anggun Dwi Panorama³⁾

¹⁾Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Berbagai cara dilakukan agar menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, Indonesia merupakan salah satu negara yang berfokus terhadap upaya mempercepat pembangunan ekonominya dengan cara melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Indonesia memanfaatkan proyek kerja sama Belt and Road Initiative (BRI) sebagai momentum untuk membantu kebutuhan nasional akan infrastruktur yang mendukung konektivitas transportasi dan juga konektivitas manusia agar lebih baik. Penelitian ini menggunakan teori Liberalisme Interdependensi menurut Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, Jr., menggambarkan kondisi di mana negara-negara saling bergantung satu sama lain melalui hubungan ekonomi, politik, dan sosial. Teori ini menekankan pentingnya kerja sama dan saling ketergantungan dalam mencapai kepentingan bersama dan meminimalisir konflik. Tiongkok merupakan negara yang menempati urutan kedua terbesar dalam investasi di Indonesia pada tahun 2023. Kereta Cepat Jakarta-Bandung, merupakan salah satu proyek BRI dan merupakan kereta berkecepatan tinggi pertama di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Dalam hal ini Tiongkok membutuhkan Indonesia dalam prosesnya karena fakta bahwa Indonesia memiliki peran strategis yang signifikan dalam memastikan keberlangsungan BRI di Asia Tenggara.

Kata Kunci: Kerja sama, Infrastruktur, Belt and Road Initiative, Tiongkok

Abstract

Various methods are being taken to produce better economic growth. Indonesia is one of the countries that is focusing on efforts to accelerate its economic development by continuing and accelerating infrastructure development. Indonesia is utilizing the Belt and Road Initiative (BRI) cooperation project as momentum to assist national needs for infrastructure that supports better transportation connectivity and human connectivity. This research uses the Liberalism Interdependence theory according to Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Jr., describing conditions in which countries depend on each other through economic, political and social relations. This theory emphasizes the importance of cooperation and interdependence in achieving common interests and minimizing conflict. China is the country that ranks second in terms of investment in Indonesia in 2023. The Jakarta-Bandung Fast Train, is one of BRI's projects and is the first high-speed train in Indonesia and also in Southeast Asia. In this case, China

needs Indonesia in the process due to the fact that Indonesia has a significant strategic role in ensuring the sustainability of the BRI in Southeast Asia.

Keywords: *Cooperation, Infrastructure, Belt and Road Initiative, Tiongkok*

PENDAHULUAN

Berbagai cara dilakukan agar menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, banyak negara lebih memperhatikan dalam melakukan pembangunan untuk kepentingannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang berfokus terhadap upaya mempercepat pembangunan ekonominya. (Darulingga) Presiden Joko Widodo memiliki lima fokus kerja di periode kedua pemerintahannya, yang salah satunya merupakan Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur. (Birokrasi) Reformasi politik luar negeri Indonesia di dasarkan pada latar belakang sejarah perjuangan kemerdekaan dan strategi geopolitik yang dimulai pada tahun 2014 ketika Presiden Joko Widodo mulai menjabat. Kebijakan ini menganalisis bagaimana berbagai variabel, termasuk dinamika politik dalam negeri, tekanan dari luar, pengalaman sejarah, dan kekuatan ekonomi berkontribusi pada pembentukan kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo. (Wardhani)

Dalam kunjungan ke daerah dan luar negeri, Presiden Joko Widodo menyampaikan dalam pidatonya bahwa terdapat beberapa program prioritasnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian rakyat, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur. (Indonesia) Pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur. Menurut Neil S. Grigg, infrastruktur adalah sebuah sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan, dan fasilitas fisik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik ekonomi maupun sosial. (rosyda) Pengembangan infrastruktur di berbagai bidang memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan sebuah wilayah. Selain itu, pembangunan yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah industri dan menciptakan kesempatan lapangan kerja baru. Pemerintah ingin mencapai tujuan ini dengan mendorong pembangunan infrastruktur seperti meningkatkan

konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh negeri. Pembangunan infrastruktur yang terus berlanjut juga akan mewujudkan keadilan sosial bagi semua warga Indonesia yang terkandung di dalam sila ke-5 Pancasila. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pembangunan di seluruh Indonesia, bukan hanya di Pulau Jawa. (Infrastruktur)

Dalam hal ini, Indonesia memiliki tantangan terhadap kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang sangat terbatas. Tiongkok merupakan salah satu negara yang berperan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, tidak diragukan lagi bahwa Indonesia dan Tiongkok bekerja sama dalam proyek infrastruktur, dan keduanya telah berkonsentrasi pada kebijakan luar negeri masing-masing di bidang infrastruktur. Negara Tiongkok sekarang sedang disorot dunia di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Tiongkok semakin menjadi aktor yang kuat dan berpengaruh dalam ranah dunia internasional. Beberapa tahun ke belakang fokus kebijakan luar negeri Tiongkok lebih banyak berfokus pada ekonomi dibandingkan pada politik. (Yu) Ditambah lagi, masuknya Tiongkok ke komunitas perdagangan bebas dunia atau *World Trade Organization* (WTO) yang dimulai sejak Juli 1986, dipengaruhi oleh kemakmuran ekonomi negara tersebut dan diakui sebagai salah satu tonggak penting dan aktor penting dalam perekonomian Internasional. Pada masa pemerintahan Xi, Tiongkok dengan jelas menunjukkan keinginan untuk menjadi aktor global dan negaranya pun lebih memilih untuk menggunakan strategi ekonomi dan menghindari militer.

Dalam Hubungan Internasional, isu yang paling sering dibahas merupakan isu pembangunan, perdamaian, dan juga isu tentang kerja sama. Hubungan Indonesia dengan negara lainnya telah dimulai saat Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. (Kemlu) Sedangkan hubungan bilateral yang terjadi dengan Indonesia dan Tiongkok dimulai sejak tahun 1950 pada kepemimpinan Presiden Soekarno. (KompasTV) Di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Tiongkok memiliki posisi yang penting dalam politik luar negeri di Indonesia karena dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo membutuhkan bantuan dari

negara asing dalam rangka mendukung kepentingan Indonesia yaitu pembangunan infrastruktur yang ambisius dan berskala besar.

Belt and Road Initiative (BRI), atau yang dulu yang dikenal dengan nama One Belt One Road (OBOR) merupakan proyek kerja sama untuk meningkatkan infrastruktur dan konektivitas antarnegara, salah satunya Indonesia. (Yose Rizal Damuri) Hal ini dimulai dengan pidato Presiden Xi Jinping di Kazakhtan pada tahun 2013, ia membicarakan pembangunan jalur perdagangan baru berdasarkan jalur sutra lama. Sebuah jaringan kuno yang menggabungkan Asia, Timur Tengah, dan Eropa selama hampir 2000 tahun. Jalur Sutra Maritim atau yang disebut dengan “road” yaitu jalur laut yang menghubungkan Tiongkok ke Asia Tenggara, Afrika, dan juga Eropa. Lalu terdapat jalur ekonomi sutra atau Silk Road Economic Belt atau disebut “belt” merupakan jalur darat yang mengacu pada jalur darat yang membentang dari Tiongkok ke Asia Tengah hingga ke Eropa.

Pasca kebangkitan Tiongkok kemampuan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok semakin meningkat dan diakui dunia. Kemampuan itulah yang menjadikan modal diplomasi proyek BRI oleh para diplomat Tiongkok yang bertujuan untuk mengenalkan skema investasi Tiongkok untuk konektivitas infrastruktur berskala global. (English) Dari segi perekonomian BRI menganggap kunci produktivitas perekonomian dan komersial merupakan pembangunan infrastruktur itu sendiri, baik dalam bentuk hard infrastructure maupun soft infrastructure. Hard Infrastructure mencakup pembangunan jalan raya, pelabuhan, kereta api, ketahanan energi, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Di sisi lain, Soft infrastructure sehubungan dengan pembangunan sosial selanjutnya peningkatan standar pendidikan, pertukaran informasi, dan pertukaran ahli. (Bank)

Meningkatnya kesadaran akan peran infrastruktur secara langsung akan mengarah pada pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Setelah membangun jalur kereta api berkecepatan tinggi, jalan raya, dan jaringan listrik, perusahaan Tiongkok yang sebagian besar merupakan badan usaha milik negara untuk dapat

mengekspor keahlian mereka ke negara lain. Selama bertahun-tahun, mencoba untuk mendorong investasi Tiongkok di luar negeri, pemerintah Tiongkok memulai Kebijakan Keluar, yang juga dikenal sebagai Strategi *Going Global*, pada tahun 1999. (Humaniora) Tiongkok telah menerapkan strategi ini dalam berbagai bentuk. Strategi ini dibuat dengan tujuan meningkatkan keterlibatan Tiongkok dalam perekonomian secara global. (Lingfei Weng)

Indonesia merupakan negara yang strategis untuk dijadikan instrumen utama hubungan diplomatik yang terjadi antara Indonesia-Tiongkok yang stabil. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Indonesia memiliki politik luar negeri yang bebas aktif. (Indonesia) Dalam hal ini telah memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk bekerja sama dengan banyak negara di seluruh dunia. Indonesia juga memiliki lokasi yang strategis di persilangan dua Samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan dua benua yaitu benua Asia dan juga Benua Australia, Indonesia patut dipertimbangkan sebagai mitra kerja sama karena wilayah tersebut terhubung ke jalur perdagangan global. (Prakash)

Indonesia juga memiliki potensi untuk memberikan pengaruh di seluruh wilayah dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara berkembang terbesar dan juga terpadat dengan kedekatan geografis yang jika dilihat merupakan negara terdekat dengan Tiongkok. (Tritto) Saat Presiden Joko Widodo menjabat di tahun 2014, fokus utama pemerintahan Jokowi adalah domestik, populis, dan mengejar kolaborasi secara internasional. (Wardhani, Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Bawah Pemerintahan Jokowi: Variasi Gagasan Tradisional) Maka dari itu, Indonesia membuka kerja sama sebesar-besarnya dengan negara lain, dalam hal ini Presiden Joko Widodo melihat BRI sebagai peluang untuk memberikan modal yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan infrastruktur dan industry di Indonesia.

Sebelum Belt Road Initiative populer, terdapat beberapa proyek infrastruktur Indonesia bersama Tiongkok yang telah dijalani sebelumnya. (Saraswati) Karena pembangunan di berbagai sektor memiliki efek yang signifikan terhadap pengembangan wilayah, BRI dianggap mampu mengatasi

kebutuhan akan fasilitas infrastruktur yang memadai. Indonesia memanfaatkan proyek kerja sama BRI sebagai momentum untuk membantu kebutuhan nasional akan infrastruktur yang mendukung konektivitas transportasi dan juga konektivitas manusia agar lebih baik. Presiden Joko Widodo memilih Tiongkok sebagai mitra kerja sama untuk meningkatkan infrastruktur Indonesia karena kesamaan kepentingan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Liberalisme Interdependensi Menurut Robert Jackson dan Georg Sorensen dalam buku mereka yang berjudul Pengantar Studi Hubungan Internasional Edisi Kelima, Liberalisme dapat dibagi menjadi empat gagasan: Liberalisme Sosiologis, Liberalisme Interdependensi, Liberalisme Institusional, dan Liberalisme Republikan. Semua ide memiliki asumsi dan perspektif yang berbeda. Penelitian kali ini akan berkonsentrasi pada liberalisme interdependensi. (Robert Jackson) Interdependensi yang artinya adalah ketergantungan timbal balik. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi dan perdagangan internasional adalah cara bagi negara-negara industri seperti Indonesia untuk mencapai kesejahteraan dan keunggulan yang lebih besar. Teori ini menjelaskan bahwa negara bukanlah aktor independent, setiap negara akan membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuannya secara keseluruhan.

Jenis liberalisme yang dikenal sebagai liberalisme interdependensi menitik beratkan pada perdagangan bebas dan aspek ekonomi, dengan tujuan mencapai kemakmuran dan keuntungan bersama antarnegara. Menurut Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, Jr., istilah "interdependensi" mengacu pada kondisi yang dipengaruhi oleh hubungan di antara negara-negara atau di antara aktor di negara-negara yang berbeda karena adanya ketergantungan timbal balik. Transaksi internasional, yang mencakup aliran uang, barang, dan pesan yang melintasi batas wilayah internasional, menyebabkan efek ini. (Robert O Keohane) Setiap negara dan aktor lain membutuhkan satu sama lain, dan karena setiap negara memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, interdependensi mendorong kerja sama bilateral dan multilateral. (Drs. Yanuar Ikbar)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Liberalisme Interdependensi karena teori tersebut melihat adanya ketergantungan antara negara Indonesia dan Tiongkok. Menggambarkan kondisi di mana negara-negara saling bergantung satu sama lain melalui hubungan ekonomi, politik, dan sosial. Teori ini menekankan pentingnya kerja sama dan saling ketergantungan dalam mencapai kepentingan bersama dan meminimalisir konflik. Dalam konteks hubungan Indonesia dan Tiongkok, *Belt and Road Initiative* (BRI) merupakan contoh nyata dari liberalisme interdependensi yang memperlihatkan bagaimana dua negara bisa saling memanfaatkan peluang untuk mencapai keuntungan bersama. Karena dalam kerjasama Indonesia dan Tiongkok terdapat kepentingan yang hendak dicapai dari kedua negara tersebut. Sehingga terjadinya timbal balik dari masing-masing aktor. Peran Tiongkok yang signifikan dalam ekonomi global, baik dalam hal investasi maupun perdagangan, Indonesia memilih Tiongkok sebagai mitra ekonominya. Tiongkok membutuhkan Indonesia untuk membantu memperkuat jalur sutra maritim Asia Tenggara, dan Indonesia membutuhkan Tiongkok untuk menyediakan dana dalam pembangunan infrastruktur berskala besar. Setelah perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok. Teori liberalisme interdependensi akan membantu peneliti menjelaskan proses saling ketergantungan dalam kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok.

Dengan menggunakan Konsep kepentingan nasional Dalam buku yang berjudul *The International Relation Dictionary* edisi ke-empat karya Jack C. Plano dan Roy Olton mengatakan bahwa dalam merumuskan suatu kebijakan luar negeri, kepentingan nasional berkaitan dengan strategi atau tindakan yang dipilih oleh pengambil keputusan suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu dibandingkan dengan negara lain secara internasional. Hubungan atau politik internasional terjadi dikarenakan setiap negara memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai. Dalam kebijakan luar negeri, interpretasi kepentingan nasional yang terus berubah terhadap faktor-faktor situasi lingkungan internasional yang sangat berubah membentuk tindakan yang diikuti. (Jack C. Plano) Menurutnya

kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi adalah beberapa unsur yang sangat penting bagi negara. Kepentingan nasional muncul dari tujuan nasional yang lebih spesifik, cakupannya lebih sempit, atau lebih berorientasi pada program, sedangkan tujuan nasional pada umumnya lebih mendasar dan bersifat jangka panjang. (Drs T. May Rudy)

METODE PENELITIAN

Peneliti memilih metode penelitian kualitatif karena tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran (deskripsi) tentang bagaimana kepentingan Indonesia dalam kerja sama dengan Tiongkok dalam proyek Belt and Road Initiative dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Metode kualitatif membantu mendapatkan deskripsi fenomena yang lengkap, dan juga meningkatkan pemahaman tentang makna suatu kejadian. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak hanya bertujuan untuk peneliti mendapatkan gambaran dan penjelasan, tetapi juga membantu mendapatkan suatu penjelasan yang lebih terperinci. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diamati subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara keseluruhan, bukan hanya dalam bentuk kata-kata dan bahasa, tetapi juga dalam lingkungan alami dan dengan menggunakan berbagai teknik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian analisis data deskriptif kualitatif. Dalam pandangan Sukmadinata, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan fenomena, seperti kondisi atau hubungan antara dua hal. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik yang berasal dari alam maupun buatan manusia, seperti bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena. (Drs. Yanuar Ikbar)

PEMBAHASAN

1) Hubungan Kerja Sama Indonesia-Tiongkok

Hubungan yang terjalin oleh Indonesia dengan Tiongkok menunjukkan komitmen nyata negara Indonesia terhadap kebijakan luar negerinya yang bebas aktif dalam perang dingin saat itu. Namun, pada kenyataannya, kepemimpinan dan situasi politik dalam negeri tetap memainkan peran penting dalam pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia. Sejak awal hubungan diplomatik yang terjadi antara Indonesia dan Tiongkok pada tahun 1950 ini telah mengalami berbagai macam lika-liku. (T.) Kedekatan antara Indonesia dan Tiongkok didorong oleh hal-hal eksternal. Terlepas dari kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi global pada abad ke-21, yang juga dikenal sebagai "*The Rise of China*", hubungan antara Indonesia dan Tiongkok telah meningkat.

Kebijakan ekonomi pintu terbuka yang diterapkan selama pemerintahan Deng Xiao Ping (1978–1987) mendorong perekonomian Tiongkok menjadi lebih baik, yang menyebabkan Kebangkitan Tiongkok. Negara Tiongkokpun memasuki ekonomi pasar modern melalui kebijakan pintu terbuka ini dan mengalami transformasi ekonomi yang signifikan sebagai akibat dari kebijakan ini. Pada tahun 1970, sebelum kebijakan ekonomi terbuka diterapkan, ekspor Tiongkok hanya mencapai 0,7% dari PDB global, atau 12% dari PDB total. Situasi berubah setelah Tiongkok menjadi salah satu ekonomi paling terbuka di dunia pada tahun 1978. (Tri Andika)

Kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Tiongkok tidak lepas dari kesamaan kepentingan antara dua negara ini, di tahun 2019 dalam periode ke-2 presiden Joko Widodo di Osaka, Jepang, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Ditandatanganinya dokumen kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok pada tahun 2015 yang mencakup bidang perdagangan, keuangan, infrastruktur, industri, pariwisata, dan hubungan antar masyarakat menunjukkan peningkatan kerja sama bilateral selama masa kepemimpinan Joko Widodo. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur di

Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah salah satu kerja sama bilateral yang paling aktif saat ini. (Anisya)

Kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok mengalami kemajuan besar dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang investasi infrastruktur dan ekonomi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang berpartisipasi aktif dalam *Belt and Road Initiative* (BRI) yang diusung oleh Tiongkok, yang bertujuan untuk meningkatkan jalur perdagangan antarbenua melalui pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika. Indonesia dan Tiongkok bekerja sama erat dalam proyek ini, yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor Indonesia ke Tiongkok dan menyebarkan produk Indonesia ke pasar global. (Anisya)

Kerja sama dalam kerangka BRI telah membawa sejumlah investasi besar dari Tiongkok ke Indonesia, khususnya di sektor infrastruktur. Salah satu proyek paling menonjol yang dibiayai oleh Tiongkok adalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini tidak hanya menjadi kereta cepat pertama di Indonesia, tetapi juga salah satu yang pertama di Asia Tenggara. Kereta cepat ini dirancang untuk mengurangi waktu perjalanan antara Jakarta dan Bandung secara signifikan, dari sekitar tiga jam menjadi kurang dari satu jam. Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas regional. Selain proyek kereta cepat, banyak proyek infrastruktur lainnya yang juga dibiayai oleh Tiongkok melalui BRI. Ini mencakup pembangunan pelabuhan, jalan tol, dan fasilitas energi, yang semuanya bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur di Indonesia dan meningkatkan efisiensi logistik dan transportasi. (V. Saraswati)

Dampak dari kerja sama ini tidak hanya terbatas pada peningkatan infrastruktur fisik, tetapi juga membawa manfaat ekonomi yang signifikan. Investasi ini dilakukan dengan harapan perekonomian Indonesia dapat tumbuh lebih cepat, membuka lebih banyak lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam kancah internasional. Dengan peningkatan infrastruktur, diharapkan biaya logistik dapat ditekan, yang

pada akhirnya akan membuat produk Indonesia lebih kompetitif di pasar global. Selain itu, peningkatan konektivitas juga memudahkan arus barang dan jasa, yang dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain seperti pariwisata, manufaktur, dan perdagangan. Secara keseluruhan, kemajuan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok di bawah proyek BRI menunjukkan komitmen kedua negara untuk saling mendukung dan membangun masa depan yang lebih sejahtera. Melalui investasi besar dan proyek-proyek strategis, Indonesia berupaya memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat fondasi ekonominya dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan partisipasi aktif dalam inisiatif global ini, Indonesia menunjukkan posisinya sebagai mitra yang penting dan strategis bagi Tiongkok di kawasan Asia Tenggara dan dunia.

Perdagangan Indonesia-Tiongkok telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tiongkok memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia karena merupakan mitra dagang terbesarnya. Selain ekspor dan impor komoditas, hubungan dagang yang kuat antara dua negara melibatkan investasi langsung yang menguntungkan perekonomian Indonesia. Produk ekspor utama Indonesia ke Tiongkok termasuk batu bara, yang digunakan untuk memenuhi permintaan energi Tiongkok yang terus meningkat, dan minyak kelapa sawit, yang merupakan salah satu produk ekspor terbesar Indonesia. Selain itu, produk manufaktur Indonesia memiliki pangsa pasar yang signifikan di Tiongkok, yang meningkatkan hubungan ekonomi antara kedua negara.

Sebaliknya, barang-barang konsumsi seperti mesin, elektronik, dan barang konsumsi lainnya diimpor ke Indonesia dari Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga negara tersebut. Investasi Tiongkok dalam pengembangan zona ekonomi khusus di berbagai wilayah Indonesia memperkuat kerja sama ekonomi ini. Investasi ini bertujuan untuk menarik investasi asing, meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Zona ekonomi khusus diharapkan meningkatkan daya saing ekonomi

Indonesia di pasar global melalui transfer teknologi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal. (Samuel)

Dalam bidang teknologi, terdapat peningkatan kerja sama yang signifikan antara Indonesia dan Tiongkok, yang mencakup berbagai industri seperti telekomunikasi dan *e-commerce*. Kerja sama ini mencakup transfer teknologi dan pengetahuan serta investasi langsung oleh perusahaan teknologi besar Tiongkok. Huawei, yang telah berinvestasi besar-besaran di Indonesia merupakan salah satu contoh dari perusahaan teknologi yang berinvestasi di Indonesia. Huawei membantu pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, termasuk jaringan 4G dan 5G, yang meningkatkan konektivitas dan kualitas layanan internet. Selain itu, organisasi ini menawarkan pendidikan dan pelatihan di bidang IT untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal. (Kominfo)

Kunjungan Presiden Joko Widodo pada tahun 2023 silam ke Tiongkok menghasilkan peningkatan sejumlah kesepakatan kerja sama antara kedua negara, dalam pertemuan bilateral ini kedua negara sepakat menguatkan kerja sama ekonomi. Pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping menandai 10 tahun kemitraan strategis komperhensif antara Indonesia dengan Tiongkok. Kedua negara sepakat memperkuat kerja sama di bidang ekonomi yang saling menguntungkan, Joko Widodo juga meminta pihak Tiongkok yang berinvestasi di Indonesia untuk mengutamakan tenaga kerja lokal, kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan akses Indonesia ke Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Indonesia. (MetroTv) Terdapat 8 kesepakatan hasil pertemuan Jokowi dan Xi Jinping yang merupakan;

1. Protokol tentang Persyaratan Pemeriksaan dan karantina untuk Ekspor Serbuk Konjac dari Indonesia ke Tiongkok
2. Protokol tentang Persyaratan Phytosanitary untuk Ekspor Tabasheer dari Indonesia ke Tiongkok
3. Rencana Aksi Kerja Sama Bidang Kesehatan
4. Nota Kesepahaman tentang Pusat Penelitian dan Pengembangan Bersama

5. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Perencanaan Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman terkait Pemindahan Ibu Kota Baru Indonesia

6. Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Tiongkok "*Two Countries, Twin Parks*"

7. Nota Kesepahaman tentang Pendidikan Bahasa Tiongkok

8. Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Ekonomi dan Teknis. (Y)

2) Belt and Road Initiative di Indonesia

Sejak lama, Asia Tenggara telah menjadi mitra strategis Tiongkok, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang besar dan kekuatan pasar yang potensial. Meskipun sebagian besar dihuni oleh negara berkembang, Asia Tenggara memiliki daya beli tinggi, yang membuat produk komoditas Tiongkok murah sangat disukai. Tiongkok sangat membutuhkan konektivitas modern, efektif, dan masif untuk mengakomodir segala aktivitas ekonomi dan perdagangan, serta untuk mendistribusikan komoditas ekspor-impornya. Meskipun banyak orang Tionghoa yang tinggal di Asia Tenggara, masyarakat Tionghoa berfungsi sebagai jembatan untuk menyebarkan budaya Tionghoa, membangun kepercayaan dan disambiguasi, dan membantu ekonomi dan perdagangan. Hal ini merupakan kemajuan yang ingin dicapai Tiongkok di Asia Tenggara sebagai bagian dari pembangunan Belt and Road Tiongkok.

Mayoritas negara di sepanjang Jalur Sutra merupakan negara berkembang. Motivasi utama di balik Belt and Road Initiative adalah untuk memanfaatkan kelebihan Tiongkok dalam memberikan subsidi dalam pembangunan infrastruktur untuk membantu negara-negara tetangga dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat kerangka kerja, serta untuk memperkuat kolaborasi keuangan atau mitra strategis dengan Tiongkok. Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam Jalur Sutra Maritim abad ke-21. Indonesia dianggap sebagai jalan masuk ke pasar Asia Tenggara atau pasar Asia yang lebih luas dari kereta cepat. Semasa negosiasi kereta cepat juga menggarap negosiasi dengan negara lain seperti Laos dan Malaysia dengan proyek serupa. Rencana pembangunan

jangka menengah tahun 2015–2023 sesuai dengan rencana 20 tahun Indonesia yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan program dukungan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. Indonesia juga menarik banyak investor asing karena ramah bisnisnya.

Pinjaman lunak dan investasi langsung adalah pilihan pendanaan lain dari Tiongkok yang tersedia melalui BRI. Pembiayaan untuk proyek infrastruktur di Indonesia sangat dibantu oleh China Development Bank (CDB) dan lembaga keuangan Tiongkok lainnya. Dengan kebijakan ini, Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya pada sumber pendanaan konvensional dan dapat mendiversifikasi sumber pendanaan untuk proyek pembangunan. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) didirikan oleh Tiongkok pada tahun 2015 untuk membiayai proyek BRI yang membutuhkan modal yang sangat besar. Tujuan dari lembaga keuangan multilateral ini adalah untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor produktif lainnya di Asia. AIIB melakukan ini dengan investasi internasional untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan pembangunan regional dan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. AIIB yang didirikan oleh Tiongkok, dan juga merupakan pemegang saham terbesar di bank tersebut. AIIB berkonsentrasi pada infrastruktur "hijau", mobilisasi modal swasta, konektivitas dan kerja sama regional, dan infrastruktur berbasis teknologi, dengan kantor pusat di Beijing.

BRI memenuhi tujuan strategis Indonesia saat ini untuk menggerakkan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan industri, terutama dengan tujuan meningkatkan konektivitas domestik dan internasional yang merupakan salah satu dari lima prioritas kerja yang terdapat di Nawa Cita (agenda prioritas nasional) yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Indonesia akan menyambut segala aktivitas dan usaha yang mendukung salah satu atau beberapa poin Nawa Cita. Indonesia juga ingin mengembangkan bisnis maritimnya, aktivitas maritim seperti ekstraksi sumber daya (perikanan) dan transportasi laut untuk menghubungkan berbagai wilayah di seluruh negara telah menjadi bagian penting dari kehidupan banyak orang Indonesia karena Indonesia adalah negara kepulauan.

Beberapa kota seperti Jakarta, Batam, Bangka Belitung, Bandar Lampung, Jambi, Dumai, Medan, dan Banda Aceh adalah bagian dari Jalur Sutra Maritim Tiongkok. Sejak dimulainya jalur sutra BRI, hubungan antara Indonesia dan Tiongkok semakin erat. Hubungan bilateral kedua negara mengalami kemajuan pesat, dan pada tahun 2013, kerja sama menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif. BRI juga membangun dan memodernisasi pelabuhan dan bandara di seluruh Indonesia. Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bandara Internasional Kertajati adalah contohnya. Selain itu, terdapat Investasi dan Pembiayaan. Banyak proyek infrastruktur di Indonesia dibiayai dengan pinjaman dan investasi dari bank-bank dan perusahaan Tiongkok. BRI juga mendorong investasi dalam sektor industri dengan membangun kawasan industri dan zona ekonomi khusus di berbagai daerah di Indonesia.

Salah satu proyek infrastruktur utama BRI yang paling menonjol di Indonesia adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tujuan dari proyek ini adalah akan ada peningkatan signifikan dalam konektivitas antara Jakarta dan Bandung serta daerah sekitarnya. Hal ini akan memudahkan perjalanan orang dan barang antara dua kota, menciptakan lebih banyak peluang kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah tersebut. Selain itu, kereta cepat akan meningkatkan aksesibilitas dan mempermudah perdagangan domestik antara Jakarta dan Bandung. Dengan transportasi yang cepat dan efisien, pergerakan barang dagangan akan lebih mudah, biaya logistik akan diturunkan, dan bisnis akan lebih terhubung satu sama lain. Ini akan mendorong pertumbuhan perdagangan dan investasi di kedua kota.

Peningkatan konektivitas wilayah di Indonesia diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Banyak pekerjaan telah diciptakan oleh proyek BRI di Indonesia, baik secara langsung selama konstruksi dan operasi proyek maupun secara tidak langsung sebagai hasil dari pengaruh ekonomi yang positif. Kekhawatiran muncul bahwa ketergantungan Indonesia pada pinjaman Tiongkok dapat meningkatkan risiko utang negara. Beberapa masyarakat juga khawatir bahwa Indonesia bisa terjebak dalam utang jika proyek-proyek ini tidak berhasil atau

menghasilkan pendapatan yang cukup. Selain itu, muncul kritik tentang penggunaan tenaga kerja asing dalam proyek BRI, karena hal itu dapat mengurangi peluang pekerjaan bagi orang lokal.

Selain itu, beberapa proyek infrastruktur besar mendapat kritik karena dampak negatifnya terhadap lingkungan, seperti kerusakan habitat dan penebangan hutan. Untuk memastikan bahwa proyek yang didanai oleh BRI benar-benar menguntungkan perekonomian nasional, pemerintah Indonesia memperkuat regulasi dan kebijakan untuk memastikan bahwa proyek tersebut memenuhi standar nasional, seperti tenaga kerja lokal dan perlindungan lingkungan. Perekonomian kota akan berkembang seiring dengan peningkatan perdagangan di pelabuhan karena pelabuhan memiliki kemampuan untuk menyediakan pasokan barang dan komoditas lainnya. Dibangunnya infrastruktur dan fasilitas di sekitar pelabuhan akan menarik para masyarakat pergi ke kota.

Hubungan antara Indonesia dan Tiongkok diperkuat oleh pembangunan Belt and Road di Indonesia. Dalam pertemuan Indonesia dan Tiongkok pada tahun 2016, berbicara tentang inisiatif investasi BRI. Tiongkok ingin berpartisipasi secara aktif dan menjalin hubungan baik dengan Indonesia karena setidaknya 70% perusahaan swasta di Indonesia berasal dari Tiongkok. BRI memberikan Indonesia kesempatan untuk meningkatkan eksportnya ke Tiongkok. Hal ini dapat terjadi karena Tiongkok merupakan negara yang bergantung dengan barang-barang Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Dilihat dari data di situs Trading Economics, Indonesia mengekspor minyak, bahan bakar mineral, dan produk penyulingan senilai \$8,28 M ke Tiongkok pada tahun 2019.

3) Kepentingan Indonesia Melalui Belt and Road Initiative

Sejalan dengan Liberalisme Interpendensi menurut Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, Jr., kondisi yang dipengaruhi oleh hubungan di antara negara-negara atau di antara aktor di negara-negara yang berbeda karena adanya ketergantungan timbal balik. Dalam hal ini, negara-negara akan saling bergantung satu sama lain melalui interaksi dan kerja sama di seluruh dunia karena adanya kepentingan. Setiap pihak di tingkat internasional, baik negara maupun non-negara, memiliki kepentingan dalam setiap tindakan

yang mereka ambil, terutama dalam kerja sama dengan negara lain. Kerja sama adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan di berbagai bidang, seperti ekonomi, keamanan, dan sosial budaya. Karena pada dasarnya setiap negara tidak dapat berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan, terlebih lanjut untuk kemajuan dan perkembangan negaranya sendiri. Ini dapat terjadi secara bilateral, di mana dua pihak bekerja sama untuk mencapai kemajuan, atau secara multilateral di mana beberapa pihak bekerja sama.

Jack C. Plano dan Roy Olton mengatakan bahwa dalam merumuskan suatu kebijakan luar negeri, kepentingan nasional berkaitan dengan strategi atau tindakan yang dipilih oleh pengambil keputusan suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu dibandingkan dengan negara lain secara internasional. Kepentingan bersama yang mendorong kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dalam Belt and Road Initiative ini. BRI mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi, juga membuka peluang investasi besar bagi infrastruktur negara. Bagi Tiongkok, inisiatif ini merupakan cara untuk meningkatkan kekuatan ekonominya dan membangun jalur perdagangan penting. Oleh karena itu, kerjasama internasional yang kompleks dan beragam ini menunjukkan dinamika global yang terus berubah, di mana setiap negara berusaha mencapai tujuan nasionalnya sambil membantu stabilitas dan kesejahteraan global.

Dengan BRI, Indonesia memiliki peluang yang sangat berharga untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonominya. Peningkatan infrastruktur, terutama di bidang transportasi, pelabuhan, jalan raya, dan kereta api, merupakan kepentingan utama bagi Indonesia. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan memfasilitasi mobilitas barang dan orang. Investasi melalui Belt and Road Initiative (BRI) memainkan peran penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur ini, memberikan dukungan finansial dan teknologi yang diperlukan untuk merealisasikan proyek-proyek besar. Dengan bantuan BRI, Indonesia dapat mempercepat penyelesaian proyek-proyek besar. Misalnya, membangun jalur kereta api baru yang menghubungkan kota-kota besar dengan wilayah

terpencil yang akan menurunkan biaya logistik, meningkatkan efisiensi distribusi barang, dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi lokal.

Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, menawarkan potensi pasar yang sangat besar bagi barang dan jasa Tiongkok. Kerja sama dalam BRI memungkinkan Tiongkok untuk memperluas pasarnya dan meningkatkan perdagangan bilateral. Ini disebabkan oleh populasi yang besar dan kelas menengah yang berkembang di Indonesia. Indonesia memiliki kesempatan untuk menarik investasi asing dari Tiongkok, yang merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, melalui Belt and Road Initiative (BRI) ini. Pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan raya, pelabuhan, dan kereta api bukanlah satu-satunya tujuan investasi ini; itu juga akan mencakup berbagai bidang penting lainnya, seperti energi, manufaktur, dan pariwisata. Misalnya, investasi Tiongkok dalam sektor energi membantu Indonesia dalam pengembangan proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya dan angin. Proyek-proyek ini sangat penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil dan mencapai target keberlanjutan lingkungan. Menurut laporan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Tiongkok menempati peringkat kedua pada 2023 dengan realisasi investasi Penanaman Modal Asing US\$7,4 miliar. Ini adalah hasil dari investasi besar Tiongkok ke Indonesia.

Pinjaman lunak yang merupakan pinjaman yang diberikan oleh suatu negara atau lembaga multilateral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi langsung, dan berbagai jenis pembiayaan lainnya adalah pilihan pembiayaan BRI yang lebih fleksibel dan seringkali lebih menguntungkan daripada sumber pendanaan konvensional. Sumber pendanaan konvensional, seperti pinjaman dari lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia atau International Monetary Fund (IMF), seringkali memiliki banyak persyaratan yang ketat, yang dapat membatasi kemampuan suatu negara untuk mengatur kebijakannya sendiri. Selain itu, risiko ekonomi global yang tidak menentu, volatilitas pasar, dan fluktuasi suku

bunga adalah masalah umum bagi mereka yang bergantung pada pasar modal global untuk pembiayaan.

Dengan berbagai cara yang signifikan, partisipasi Indonesia dalam BRI meningkatkan konektivitasnya baik secara regional maupun internasional. Pengembangan infrastruktur transportasi yang canggih dan efisien merupakan hasil terbesar dari partisipasi ini. Infrastruktur ini merupakan dasar bagi integrasi ekonomi yang lebih dalam dan konektivitas yang lebih luas. BRI dapat meningkatkan akses Indonesia ke pasar global melalui pembangunan dan modernisasi pelabuhan dan bandara. Dengan pelabuhan yang lebih besar dan efisien, volume impor dan ekspor dapat meningkat, waktu tunggu kapal dapat dikurangi dan arus barang dapat dipercepat. Meningkatkan efisiensi logistik nasional dapat dicapai melalui proyek infrastruktur ini. Jalan tol baru, rel kereta api, dan infrastruktur pendukung lainnya yang dibangun di bawah proyek BRI mampu mengurangi biaya dan waktu pengiriman barang. Produk Indonesia memiliki daya saing yang lebih besar di pasar global karena pengiriman yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah.

Posisi Indonesia sebagai pusat perdagangan Asia Tenggara akan diperkuat oleh peningkatan infrastruktur dalam negeri ini. Indonesia dapat menarik investasi asing dan menjadi pusat distribusi regional dengan memiliki pelabuhan dan bandara modern serta jaringan transportasi darat yang efisien. Indonesia adalah tempat yang bagus bagi perusahaan multinasional untuk mengakses pasar di seluruh Asia Tenggara, yang memiliki populasi besar dan ekonomi yang berkembang pesat. Selain itu, partisipasi dalam BRI membantu integrasi ekonomi di wilayah tersebut melalui berbagai program perdagangan bebas dan kolaborasi yang direncanakan. Indonesia dapat memanfaatkan kerja sama BRI untuk memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara mitra, membuka peluang ekspor baru, dan mengembangkan sektor ekonomi yang berpotensi besar. Dengan menjadi bagian dari jaringan perdagangan global yang didukung oleh BRI, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya dan memainkan peran yang lebih besar dalam ekonomi global.

Di dalam negeri, kerangka kerja sama yang ditandatangani BRI ini mendapat dukungan dan kritik. Beberapa masyarakat yang mendukung menyatakan bahwa dengan investasi Tiongkok masuk ke Indonesia, akan ada banyak keuntungan bagi negara, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. (Tempo) Terdapat beberapa pembangunan infrastruktur yang terjadi di Indonesia pada periode ke-2 presiden Jokowi. Seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang sudah dimulai sejak tahun 2023 dan dengan rencana akan rampung pada 2045, adanya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang disahkan sejak tahun 2016 dan sudah mulai beroperasi pada 2023, pembangunan MRT fase 2 yang telah diresmikan pada Februari 2022, Selain itu, pada 28 Agustus 2023, Jokowi meresmikan pembangunan *Light Rail Transit* (LRT), yang telah berlangsung sejak 2015. (C. Indonesia) Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus kepada salah satu pembangunan infrastrukturnya yang merupakan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

4) Kerja sama Indonesia-Tiongkok dalam Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Salah satu negara yang menerima program BRI Tiongkok adalah negara Indonesia. Dalam hal membangun infrastruktur, Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo membutuhkan sumber dana yang besar. Indonesia juga menyambut investor asing untuk berinvestasi yang terdapat pada prioritas kerja Presiden Jokowi periode ke-2 upaya untuk meningkatkan konektivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Walaupun dikenal sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki lokasi geografis yang strategis, Indonesia masih menghadapi beberapa masalah. Salah satu masalah yang muncul sebagai akibat dari kondisi alamnya adalah masalah pemerataan karena sulit untuk mencapai setiap wilayah.

Tidak hanya menghubungkan antarpulau tetapi juga antarkota di seluruh Indonesia dengan infrastruktur transportasi yang baik. karena adanya infrastruktur yang memadai akan membuat orang lebih mudah bergerak dan berdampak pada kemajuan negara dalam bidang politik, sosial-

budaya, dan juga ekonomi. Salah satu bagian dari Belt and Road Initiative (BRI) yang diprakarsai oleh Tiongkok merupakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung proyek ini menunjukkan hubungan strategis yang kuat antara kedua negara dan dimulai sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mengurangi kemacetan di jalur transportasi yang sangat padat antara Jakarta dan Bandung. Indonesia ingin membangun kereta cepat tanpa menggunakan APBN.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang menghubungkan Jakarta dan Bandung, merupakan kereta berkecepatan tinggi pertama di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Proyek ini mungkin merupakan contoh terbesar dari diplomasi infrastruktur Beijing. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas melalui proyek kereta cepat ini memberikan dampak signifikan bagi hubungan antara Jakarta dan Bandung. Dengan jarak tempuh sepanjang 142 kilometer dan kecepatan maksimal mencapai 350 km/jam, kereta cepat ini mampu memangkas waktu perjalanan yang sebelumnya memakan waktu sekitar 3,5 jam menjadi hanya 40 menit. Pengurangan drastis dalam waktu perjalanan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transportasi antar kota tetapi juga memberikan manfaat besar bagi perekonomian dan kualitas hidup masyarakat di kedua kota tersebut. Dengan adanya kereta cepat ini, mobilitas penduduk dan barang menjadi lebih lancar, memungkinkan mereka untuk lebih mudah melakukan perjalanan bisnis, pendidikan, dan pariwisata.

Hal ini juga menandai "proyek luar negeri" Tiongkok untuk kereta api berkecepatan tinggi yang memasuki pasar internasional. Selama bertahun-tahun, proyek ini mendapat perhatian luas dan menimbulkan ekspektasi yang tinggi. Kereta Cepat Jakarta-Bandung berhasil diselesaikan berkat bantuan Presiden Xi Jinping dan Presiden Indonesia Joko Widodo, dan mulai beroperasi pada tanggal 7 September. Peristiwa penting ini bertepatan dengan sepuluh tahun kemitraan strategis yang komprehensif antara Tiongkok dan Indonesia, serta "tahun pertama" pembangunan masyarakat masa depan bersama antara kedua negara. Ini memiliki hubungan sejarah yang signifikan.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah bagian penting dari BRI yang sangat baik antara Tiongkok dan Indonesia. Ini adalah kereta api berkecepatan tinggi pertama Tiongkok yang menjelajah ke luar negeri dan mewakili "Jalan Persahabatan", yang menunjukkan hubungan persahabatan antara Tiongkok dan Indonesia. Ini mewujudkan konsultasi menyeluruh, konstruksi bersama, dan keuntungan bersama, yang merupakan prinsip BRI.

Selama periode 2019-2023, China Development Bank terus memberikan dana yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek ini. Pinjaman dan investasi langsung dari Tiongkok sangat penting untuk memastikan bahwa proyek memiliki sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan semua tahap pembangunan. China Development Bank memainkan peran penting dalam menyediakan pembiayaan yang stabil dan berkelanjutan, yang memungkinkan proyek untuk mengatasi berbagai masalah keuangan yang mungkin muncul selama proses pembangunan. Selain itu, kelanjutan investasi Tiongkok menunjukkan komitmen mereka terhadap proyek tersebut untuk waktu yang lama, yang menumbuhkan kepercayaan bagi semua pihak yang terlibat.

Dukungan Tiongkok tidak hanya berupa dana, tetapi juga pengetahuan teknis dan manajemen proyek yang berharga. Perusahaan Tiongkok menggunakan teknologi dan metodologi konstruksi yang efektif dan berkualitas tinggi untuk menyelesaikan proyek. Sebaliknya, pemerintah Indonesia memberikan bantuan keuangan dan logistik untuk memastikan proyek berjalan lancar. Penyediaan lahan, perizinan, dan penyelesaian masalah sosial dan lingkungan yang mungkin muncul selama pembangunan merupakan bagian dari dukungan dari pemerintah Indonesia. Hubungan yang erat dan menguntungkan yang ditunjukkan oleh kerja sama antara kedua negara ini akan menjadi contoh untuk proyek infrastruktur lainnya. Selain itu, kerja sama ini menunjukkan bagaimana kolaborasi strategis antara negara berkembang dapat membawa pembangunan yang signifikan dan berkelanjutan.

Adanya masalah dalam hal pembangunan bukanlah hal asing, seperti contohnya adanya pembengkakan biaya yang dalam proposal awal proyek

kereta cepat Jakarta-Bandung USD 5.5 Billion, lalu perjanjian antara Indonesia dan Tiongkok setuju di USD 5.9, dan situasi terakhir berada di biaya USD 7.3 Billion. Jika dibandingkan dengan proposal awal Jepang yang ditulis sebesar USD 6.2 Billion, proposal Tiongkok jauh lebih rendah akan tetapi setelah dihitung pembengkakkannya, Proyek KCJB menjadi lebih dari proposal awal yang di tawarkan oleh Jepang.

Pembengkakan biaya dan masalah keuangan lainnya diatasi oleh fleksibilitas pendanaan China Development Bank. Bank ini memberikan dukungan keuangan tambahan ketika diperlukan, memungkinkan proyek untuk terus berjalan meskipun biaya konstruksi meningkat karena berbagai faktor tak terduga. Pendanaan yang fleksibel ini memastikan bahwa proyek dapat memenuhi kekurangan anggaran tanpa menghentikan atau menunda banyak pekerjaan. Lalu adanya pemunduran waktu pengerjaan karena banyaknya masalah tak terduga seperti nyatanya dalam akuisisi lahan membutuhkan waktu selama 3 tahun dari tahun 2016-2019 lalu akhirnya konstruksi mundur ke 2020. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan penundaan yang signifikan dan komplikasi pada rantai pasokan bahan konstruksi.

Di lokasi proyek, protokol kesehatan yang ketat harus diterapkan untuk menjaga kesehatan karyawan dan mencegah jadwal yang terus berubah. Pemunduran waktu juga terjadi saat mendekati waktu peresmian pada tahun 2023 yang harusnya di resmikan bulan Juli 2023 tetapi mundur sampai bulan September 2023. Masalah ini dapat diatasi melalui kolaborasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok, serta konsorsium PT KCIC. Meskipun terdapat banyak hambatan, pemerintah kedua negara menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai rencana.

KESIMPULAN

Kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Tiongkok didasarkan oleh adanya kesamaan kepentingan kedua negara demi mencapai kepentingan nasionalnya. Keterlibatan Indonesia dalam proyek *Belt and Road Initiative*

tidak hanya menguntungkan satu pihak. Dalam hal ini Tiongkok membutuhkan Indonesia dalam prosesnya, disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia memiliki peran strategis yang signifikan dalam memastikan keberlangsungan BRI di Asia Tenggara. Menurut peta BRI, proyek besar Tiongkok akan melewati wilayah maritim Indonesia, dan Indonesia harus berpartisipasi dalam upaya tersebut.

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang merupakan bagian penting dari *Belt and Road Initiative* antara Tiongkok dan Indonesia, yang merupakan salah satu contoh kerja sama infrastruktur yang sangat baik antara kedua negara. Dalam jangka panjang, penyelesaian dan pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan meningkatkan investasi lokal, menciptakan lebih banyak pekerjaan bagi orang Indonesia, dan mendorong pertumbuhan komersial dan pariwisata di sekitarnya. Ini akan mendorong pembentukan titik pertumbuhan baru dan mempercepat Pertumbuhan ekonomi yang berpusat di sekitar jalur kereta api.

Tiongkok telah menginvestasikan sejumlah besar uang dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, yang mencakup proyek strategis seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ini tidak hanya membantu Indonesia dalam meningkatkan konektivitas dan efisiensi transportasi, tetapi juga membuka pintu bagi perusahaan konstruksi dan teknologi Tiongkok untuk mengeksplorasi pasar baru. Dengan meningkatkan konektivitas regional, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan daya saing, peningkatan infrastruktur mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat membantu masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan meningkatkan pendapatan dan saling menguntungkan. Kesuksesan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung menunjukkan kematangan dan efisiensi teknologi kereta api berkecepatan tinggi Tiongkok, yang ditandai dengan standar internasional dan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan, serta manfaat kerja sama berkualitas tinggi di bawah BRI bagi masyarakat setempat. Selain itu, keberhasilan proyek ini dapat berfungsi sebagai contoh positif untuk inisiatif serupa dan akan membantu memperkuat dan mempercepat hubungan persahabatan Tiongkok-Indonesia. Hal ini juga meningkatkan keyakinan

banyak negara berkembang dalam mengupayakan jalan pembangunan yang sesuai dengan keadaan nasional mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisya, Z. Kiki. "Analisis Kerjasama Bilateral Sosial Politik China Dan Indonesia." *Jurnal Artefak* (2023): 79.
- Bank, Asian Development. *Infrastructure and Its role in development*. Manila: Asia's Infrastructure Needs, 2017.
- Birokrasi, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. 5 *Prioritas Kerja Presiden 2019-2024*. 2020. 30 Juli 2024.
- Cipto, Bambang. *Strategi Tiongkok Merebut Status Super Power*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, n.d.
- Darulingga, Vrastian. "Kepentingan Indonesia Melakukan Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Dengan Tiongkok Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014 – 2019." *JOM FISIP* (2023): 2.
- Drs T. May Rudy, S.H., MIR., M.Sc. *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung, 2002.
- Drs. Yanuar Ikbar, MA., Ph.D. *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*. Bandung, 2014.
- English, Al Jazeera. *What is Tiongkok's Belt and Road Initiative? | Start Here*. 7 Juli 2021. 14 November 2023.
- Humaniora, Organisasi Riset Ilmu Sosial dan. *Migrasi Transnational di Kota-Kota Perbatasan di Asia Tenggara Studi Kasus: Perbatasan Vietnam-Tiongkok di Mong Cai*. n.d. 10 December 2023.
- Indonesia. *Undang-Undang No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri*. Jakarta: Sekretariat Negara, n.d.
- Indonesia, CNN. *Daftar Proyek Infrastruktur di Periode Kedua Jokowi*. 2023. Juli 2024.
- Indonesia, Kementrian Sekretariat Negara Republik. *Presiden Jokowi Paparkan Empat Hal Penting dalam Pembangunan Konektivitas*. 18 Oktober 2023. 30 Juli 2024.
- Infrastruktur, Sarana Multi. *Pentingnya pembangunan infrastruktur di Indonesia*. 2022.
- Jack C. Plano, Roy Olton. *The International Dictionary*. England: Clio Press Ltd, 1982.
- Kemlu. *Kerja Sama Bilateral*. 6 Januari 2023. 16 December 2024.
- Kominfo. *Indonesia - Tiongkok Perkuat Kerja Sama Sektor Digital*. 2023. 20 Juli 2024.

- KompasTV. *Indonesia dan Tiongkok Bangun Kerja Sama Bilateral*. 21 Juni 2017. 10 November 2024.
- Lingfei Weng, Lan Xue, Jeffrey Sayer, Rebecca Anne Riggs, James, Aghni Klituni. "Challenges faced by Chinese firms implementing the 'Belt and Road Initiative': Evidence from three railway projects." *Science Direct* (2021): 3.
- MetroTv. *Kunjungan Presiden Jokowi ke Tiongkok Membuahkan Kerja Sama Ekonomi*. 2023. 12 Juni 2024.
- Prakash, Teesta. *Geopolitics and the Jakarta-Bandung high-speed railway*. 27 Oktober 2024. 28 december 2023.
- Robert Jackson, George Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. New York, 2013.
- Robert O Keohane, Joseph S. Nye. *Power and Interdependence* . 2011.
- rosyda. *Pengertian Infrastruktur: Jenis, Fungsi, Manfaat, dan Peranannya*. 2018.
- Samuel, Ferry. "Konflik Perdagangan Indonesia-China", Penelitian dan Pengembangan Perdagangan." *Penelitian dan Pengembangan Perdagangan* (n.d.): 73.
- Saraswati, Ni Made Vira. *Menilik Perjanjian Indonesia-Cina dalam Kerangka Belt and Road Initiative (BRI) dalam Perspektif Ketahanan Nasional*. 2019.
- Saraswati, Vira. "Menilik Perjanjian Indonesia-Cina dalam Kerangka Belt and Road Initiative (BRI) dalam Perspektif Ketahanan Nasional." *Jurnal Kajian Lemhannas* (2019): 57.
- T., Judjatmiko. "Analisa Hubungan China-Indonesia Terkait Keantariksaan." *Jurnal Lapan* (n.d.): 139.
- Tempo. *Indonesia Ikut One Belt One Road Cina, Untung atau Rugi*. n.d. 24 Juni 2024.
- Tri Andika, Allya Nur. "Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan." *Indonesian Perspective* (2017): 165.
- Tritto, Angela. "Contentious Embeddedness Chinese State Capital and the Belt and Road Initiative in Indonesia." *Made in China Journal* (2020).
- Wardhani, Baiq. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Bawah Pemerintahan Jokowi: Variasi Gagasan Tradisiona." *Jurnal Issues and Studies* (2023).
- . *Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Bawah Pemerintahan Jokowi: Variasi Gagasan Tradisional*. 6 November 2023. 14 January 2024.
- Y, Emmir. *Ini Dia 8 Kesepakatan Hasil Pertemuan Jokowi & Xi Jinping*. 2023. 30 Juli 2024.

Yose Rizal Damuri, Vidhyandika Perkasa. "Perceptions and Readiness Of Indonesia Towards The Belt And Road Initiative." *Centre For Strategic and International Studies(CSIS)* (2019): 1-2.

Yu, Yongding. *The reform of Tiongkok's exchange rate regime*. Australia: Australian National University, 2018.